

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada awal penelitian ini, bertujuan untuk memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi anggota dewan perempuan serta strategi yang dilakukan dalam memperjuangkan kebijakan dan program yang berperspektif *gender* di DPRD Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019 - 2024. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi hambatan utama yaitu minimnya jumlah anggota dewan perempuan sehingga timbulnya beberapa tantangan, seperti tantangan struktural berupa keterbatasan jumlah dan posisi strategis perempuan dalam struktur DPRD; tantangan kultural yang berkaitan dengan sistem budaya patriarki yang masih melekat; tantangan institusional berkaitan dengan mekanisme dan prosedur kebijakan yang belum sepenuhnya memberikan ruang bagi masuknya perspektif *gender*; kemudian tantangan stigmatisasi sosial yang terlahir dalam bentuk stereotip *gender* dan pandangan yang memarginalkan isu perempuan dalam dinamika politik legislatif.

2. Dalam menghadapi hambatan dan tantangan tersebut, anggota dewan melakukan berbagai strategi sebagai upaya untuk tetap terlibat dalam proses kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Strategi yang dilakukan meliputi advokasi isu *gender* dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan; pembangunan koalisi dan jejaring politik baik di dalam maupun di luar DPRD; pemanfaatan dukungan partai politik; kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat; serta komunikasi dan negosiasi dalam forum - forum kelembagaan. Strategi - strategi ini mencerminkan tindakan anggota dewan perempuan dalam menavigasi dinamika politik dan kelembagaan guna tetap menyuarkan kepentingan perempuan dalam proses kebijakan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Kapasitas Yang Substantif Anggota Dewan Perempuan

Anggota dewan perempuan perlu diperkuat dari sisi kapasitas politik, pemahaman substansi kebijakan, serta kemampuan legislasi dan penganggaran agar mampu terlibat lebih efektif sebagai aktor kritis dalam menginisiasi, mengawal, dan memperjuangkan kebijakan serta program berperspektif *gender*.

2. Penguatan Strategi Advokasi Melalui Koalisi dan Kerja Sama Lintas Aktor

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah keterwakilan, anggota dewan perempuan perlu mengoptimalkan strategi advokasi dengan membangun koalisi bersama anggota dewan lain yang memiliki kesadaran *gender*, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, sehingga posisi kekuatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan dan program dapat setara.

3. Penguatan Komitmen Kelembagaan dan Partai Politik Dalam Mendukung Pengarusutamaan *Gender*

DPRD Provinsi Jawa Tengah dan partai politik diharapkan berkomitmen untuk memberikan dukungan yang lebih konsisten terhadap agenda kebijakan dan program berperspektif *gender* melalui penempatan perempuan pada posisi strategis, penguatan komunikasi dan negosiasi politik, serta dukungan terhadap pengarusutamaan *gender* dalam agenda legislatif daerah.